



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 73 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017-2018**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2017-2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

LAMPIRAN PERATURAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	ANALISA KONDISI	3
	1. Kondisi Geografis dan Demografi	3
	2. Pendidikan	5
	3. Kesehatan	11
	4. Ekonomi	16
	5. Sosial	24
BAB III	RENCANA AKSI PENGARUSTAMAAN GENDER	30
	1. Isu Strategis	30
	2. Strategi	30
	3. Arah Kebijakan	30
	4. Matrik RAD PUG 2017-2018	32
BAB IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	42
	1. Pemantauan	42
	2. Evaluasi	42
BAB VII	PENUTUP	43



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 73 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Kabupaten Tulungagung;
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2017-2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tulungagung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.



10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point Gender* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2018 yang selanjutnya disebut RAD PUG 2017-2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulungagung



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG 2017-2018 adalah untuk :

- a. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan mulai tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG 2017-2018 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) RAD PUG 2017-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Bab I : Pendahuluan
 2. Bab II : Analisa Situasi
 3. Bab III : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender
 4. Bab IV : Pemantauan Dan Evaluasi
 5. Bab V : Penutup
- (2) RAD PUG 2017-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi RAD PUG 2017-2018 dilaksanakan oleh Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

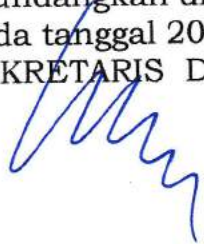
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 73 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya PUG di berbagai bidang pembangunan di Daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan RAD PUG 2017-2018.

RAD PUG 2017-2018 berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

RAD PUG 2017-2018 diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Daerah.

BAB II ANALISA KONDISI

1. Kondisi Geografis dan Demografi

Kondisi Kabupaten Tulungagung dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 Km² yang terletak diantara 111°43' – 112° 07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi ke dalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan, dengan jumlah per kecamatan sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, RW dan RT Tahun 2015

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Besuki	10	21	44	226
2.	Bandung	18	45	95	333
3.	Pakel	19	45	93	317
4.	Campurdarat	9	27	78	330
5.	Tanggunggunung	7	37	73	173
6.	Kalidawir	17	54	134	443
7.	Pucanglaban	9	25	46	170
8.	Rejotangan	16	46	146	480
9.	Ngunut	18	37	149	443
10.	Sumbergempol	17	46	121	372
11.	Boyolangu	17	44	107	462
12.	Tulungagung	14	-	93	331
13.	Kedungwaru	19	46	131	499
14.	Ngantru	13	43	116	361
15.	Karangrejo	13	39	72	264
16.	Kauman	13	34	90	311
17.	Gondang	20	49	104	379
18.	Pagerwojo	11	37	62	230
19.	Sendang	11	52	97	281
Jumlah		271	727	1.851	6.405

Sumber : Buku Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2015

Jumlah penduduk Daerah tahun 2015 sebanyak 1.215.429 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 611.025 jiwa atau sebesar 50,27% dan penduduk perempuan sejumlah 604.404 jiwa atau sebesar 49,73%. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 101.277 jiwa atau sebesar 8,33%, sedangkan Kecamatan Tanggunggunung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 28.378 jiwa atau 2,33% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.151 jiwa/km². Selanjutnya berdasarkan distribusi penyebaran penduduk tiap kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel
Distribusi Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah Kecamatan (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
1.	Besuki	21.695	21.690	43.385	82,16	528
2.	Bandung	26.759	26.778	53.537	41,96	1.276
3.	Pakel	29.592	29.540	59.132	36,06	1.640
4.	Campurdarat	32.651	31.772	64.423	39,56	1.628
5.	Tanggunggunung	14.167	14.211	28.378	117,73	241
6.	Kalidawir	41.778	41.006	82.784	97,81	846
7.	Pucanglaban	14.685	14.790	29.475	82,94	355
8.	Rejotangan	45.836	45.163	90.999	66,49	1.369
9.	Ngunut	47.450	46.606	94.056	37,7	2.495
10.	Sumbergempol	39.696	38.665	78.361	39,28	1.995
11.	Boyolangu	45.847	44.760	90.607	38,44	2.357
12.	Tulungagung	37.777	38.308	76.085	13,67	5.566
13.	Kedungwaru	50.988	50.289	101.277	29,74	3.405
14.	Ngantru	32.285	32.036	64.321	37,03	1.737
15.	Karangrejo	25.074	24.748	49.822	35,54	1.402
16.	Kauman	28.812	28.615	57.427	30,84	1.862
17.	Gondang	32.846	32.406	65.252	44,02	1.482
18.	Pagerwojo	17.338	17.229	34.567	88,22	392
19.	Sendang	25.749	25.792	51.541	96,46	534
Jumlah		611.025	604.404	1.215.429	1.055,65	1.151

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

2. Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar disegala tingkatan baik formal maupun informal. Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan pendidikan antara lain meliputi banyaknya sekolah, murid dan guru yang dirinci menurut jenjang/tingkatan pendidikan yaitu SD, SMP, SMA dan SMK berdasarkan jenis kelamin dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Per Jenjang Pendidikan Tahun 2015

No.	Komponen	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	SD/MI			
1.	Jumlah Siswa (orang)			99.010
	a. SD	43.125	39.608	82.733
	b. MI	8.300	7.977	16.277
2.	Jumlah Guru (orang)			8.402
	a. SD	2.282	4.952	7.234
	b. MI	419	749	1.168
3.	Jumlah Sekolah (Lembaga)			769
	a. SD			664
	b. MI			105
II	SMP/MTs			
1.	Jumlah Siswa (orang)			48.448
	a. SMP	18.220	17.308	35.528
	b. MTs	6.329	6.591	12.920
2.	Jumlah Guru (orang)			3.689
	a. SMP	1.088	1.549	2.637
	b. MTs	480	572	1.052
3.	Jumlah Sekolah (Lembaga)			113
	a. SMP			74
	b. MTs			39
III	SMA/SMK/MA			
1.	Jumlah Siswa (orang)			34.530
	a. SMA	5.084	7.489	12.573
	b. SMK	10.284	7.201	17.485
	c. MA	1.641	2.831	4.472
2.	Jumlah Guru (orang)			2.760
	a. SMA	444	513	957
	b. SMK	580	726	1.306
	c. MA	243	254	497

No.	Komponen	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3.	Jumlah Sekolah (Lembaga)			72
	a.SMA			24
	b. SMK			30
	c. MA			18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

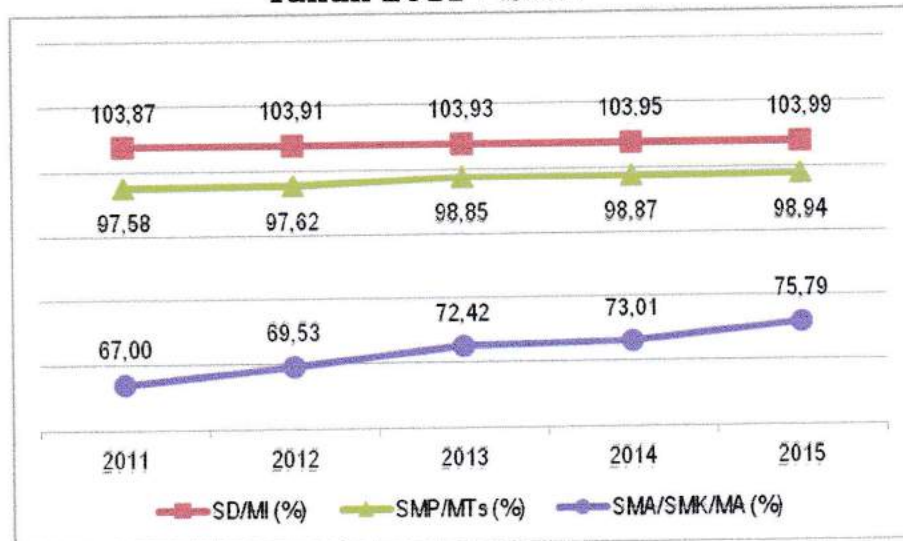
Kabupaten Tulungagung juga memiliki beberapa perguruan tinggi diantaranya Universitas Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri, STKIP PGRI, STIT Muhammadiyah, STIT Diponegoro, Akbid, STIKes, LP2I Brawijaya dan Krisna Informatika.

Berikut adalah perkembangan pembangunan urusan pendidikan selama kurun waktu tahun 2011 s/d 2015 :

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Untuk mendapatkan gambaran Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik di bawah.

**Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tulungagung (%)
Tahun 2011 - 2015**



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwasanya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 sebesar 103,99% atau meningkat sebesar 0,04% dibanding tahun 2014. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 98,94% atau meningkat sebesar 0,07% dibanding tahun 2014. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 75,79%, atau naik sebesar 2,78% dari tahun 2014.

**Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 - 2015**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	2013		2014		2015	
	L	P	L	P	L	P
SD/MI (%)	103.93	103.91	103.43	103.40	104.75	104.79
SMP/MTs (%)	98.85	98.80	94.45	94.40	99.81	99.99
SMA/SMK/MA (%)	72.42	72.50	73.01	73.05	77.83	77.70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

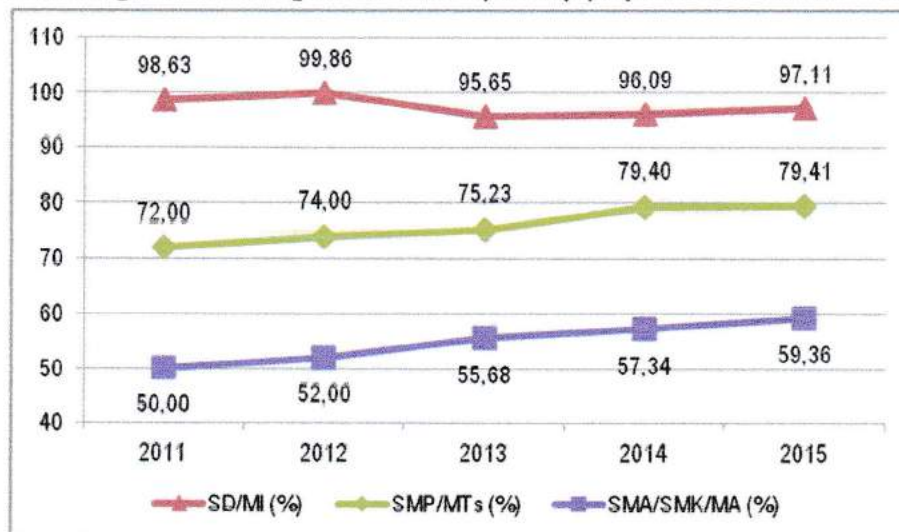
Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa secara umum terjadi kenaikan angka partisipasi kasar dari tahun 2013 ke tahun 2015, khususnya untuk usia 16-18 tahun. Namun, untuk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sifatnya fluktuatif. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa APK perempuan pada jenjang sekolah SD sampai SMA lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Fenomena ini cukup memprihatinkan, ditegah-tengah gencarnya upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, namun justru ada kecenderungan menurunnya partisipasi laki-laki dalam pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. APK dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen.

Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Tahun 2011 - 2015



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

[Handwritten signature]

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwasanya Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2014 sebesar 96,09%, dan pada tahun 2015 sebesar 97,11%, atau meningkat sebesar 1,02%.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 79,40%, dan pada tahun 2015 sebesar 79,41%, atau meningkat sebesar 0,01%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 57,34%, dan pada tahun 2015 sebesar 59,36%, atau meningkat sebesar 2,02%.

Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2015

Angka Partisipasi Murni (APM)	2013		2014		2015	
	L	P	L	P	L	P
SD/MI (%)	95.65	95.60	96.09	95.08	97.49	97.49
SMP/MTs (%)	75.23	75.20	79.40	79.39	82.10	82.05
SMA/SMK/MA (%)	55.68	55.65	57.34	57.35	60.75	60.70

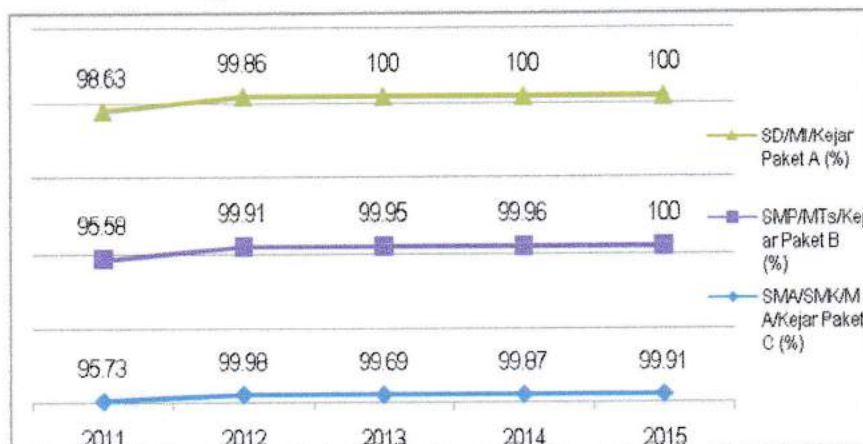
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa Angka Partisipasi Murni untuk golongan usia semakin tinggi, APMnya semakin rendah. Kecenderungan ini terjadi baik di kelompok laki-laki maupun perempuan, meskipun jika dilihat persentasenya, perempuan sedikit lebih rendah APMnya dibandingkan laki-laki. Suatu hal yang sangat memprihatinkan bahwa APM usia 16-18 tahun masih dibawah 70%, artinya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan menengah atas, masih sangat rendah.

c. Jumlah Lulusan, dan Angka Putus Sekolah

Angka lulusan berdasarkan jenjang sekolah, tampak mulai terjadi sejak SD, dan menunjukkan persentase yang menurun seiring dengan jenjang sekolah. Hal ini mengindikasikan masih adanya hambatan bagi anak untuk bertahan belajar di sekolah sejak memasuki sekolah dasar. Untuk menunjang program wajib belajar sembilan Tahun, kenyataan ini harus mendapatkan perhatian.

Grafik Angka Kelulusan Tahun 2011 - 2015 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwasanya angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2014 sebesar 100%, dan pada tahun 2015 sebesar 100%. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 99,96%, dan pada tahun 2015 sebesar 100%, atau meningkat sebesar 0,04%. Sedangkan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 99,87% dan pada tahun 2015 sebesar 99,91%, atau meningkat sebesar 0,04%.

Tabel
Angka Kelulusan Tahun 2013 - 2015 (%) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2013	8.485	7.879	7.177	7.422	4.729	4.911
2014	8.249	7.887	6.845	6.849	4.458	4.423
2015	8.536	8.350	7.377	7.236	5.120	5.289
Jumlah	25,270	24,116	21,399	21,507	14,307	14,623

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung

d. Angka Buta Huruf dan Melek Huruf

Angka buta huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Daerah selama kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut di bawah:

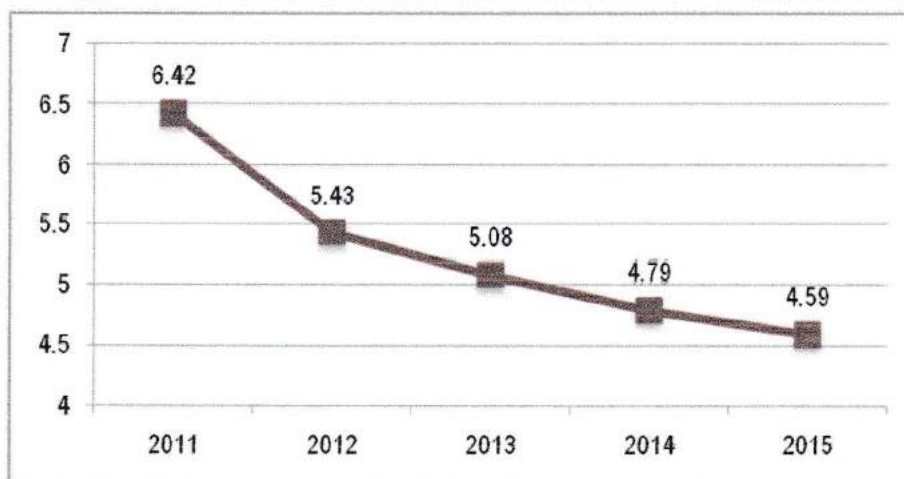
Tabel Angka Buta Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2011 - 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Buta Huruf (%)	6,42	5,43	5,08	4,79	4,59*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

*) Angka Sementara

Grafik Angka Buta Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Angka buta huruf pada tahun 2014 sebesar 4,79% dan pada tahun 2015 menjadi 4,59% atau turun sebesar 0,20%, sedangkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam data berikut.

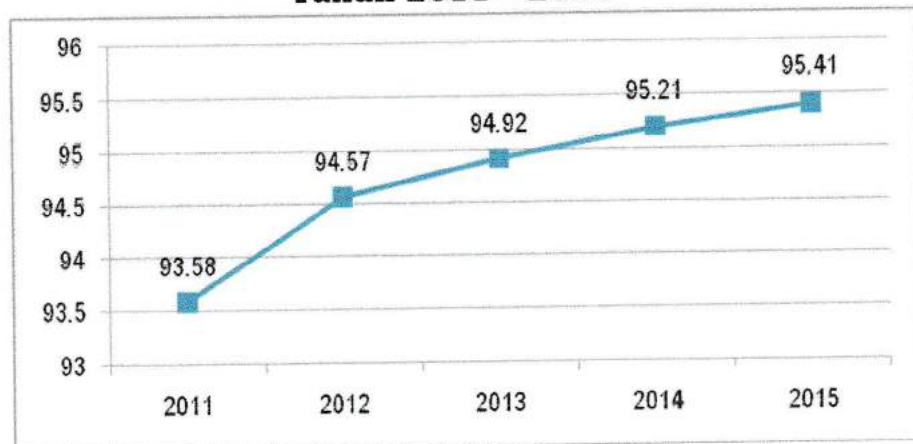
Tabel Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2011 - 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf (%)	93,58	94,57	94,92	95,21	95,41*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

*) Angka Sementara

Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas (%) Tahun 2011 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Angka melek huruf penduduk di Daerah tahun 2014 sebesar 95,21%, dan tahun 2015 menjadi 95,41%, atau meningkat sebesar 0,20%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang sangat mendasar terkait dengan keinginan untuk mendapatkan harapan hidup yang panjang, memiliki ilmu pengetahuan, dan memperoleh banyak pilihan lain dalam membelanjakan penghasilannya. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Untuk kurun waktu tahun 2011 - 2015, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebagaimana disajikan dalam data berikut ini:

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011 - 2015

Variabel IPM	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
IPM Kab. Tulungagung	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

3. Kesehatan

Permasalahan atau isu strategis gender dalam bidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Kesehatan Reproduksi, Partisipasi dalam ber KB, Penolong Persalinan, cakupan imunisasi, status gizi balita, HIV/AIDs dan penyakit menular lainnya.

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari besaran Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) pada periode tertentu.

AKB didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. AKI adalah jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan dan nifas per 100.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. AKB dan AKI di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Tabel Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015

Jenis Data	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Bayi (/1.000 KH) Kabupaten Tulungagung	7,09	7,51	8,01	8,81	9,45
Angka Kematian Bayi (/1.000 KH) Provinsi Jawa Timur	29,24	28,31	27,50	26,66	25,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2014 sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 9,45 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Penyebab langsung diantaranya masih banyak kasus-kasus bayi berat lahir sangat rendah (< 1.500 gr), penatalaksanaan kasus-kasus asfiksia (bayi lahir tidak bisa bernafas secara spontan) yang belum maksimal, meningkatnya kasus ibu hamil resiko tinggi, banyaknya bayi lahir cacat. Sedangkan penyebab tak langsung diantaranya perubahan perilaku

masyarakat terutama di daerah pinggiran dan pegunungan, dalam mengkonsumsi makanan untuk ibu hamil kurang sehat sehingga berdampak pada gangguan bayi dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan bayi masih kurang.

Tabel Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015

Jenis Data	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu (/100.000 KH) Kabupaten Tulungagung	122,67	68,29	114,44	104,4	106,53
Angka Kematian Ibu (/100.000 KH) Provinsi Jawa Timur	104,3	97,43	97,39	93,53	89,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Angka Kematian Ibu pada tahun 2014 sebesar 104,4 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 106,53 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah kelahiran hidup dimana tahun 2014 sebesar 15.322 dan di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 15.019 sedangkan apabila dilihat dari jumlah kematian ibu tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebanyak 16 orang. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan AKI melalui pengkajian dan pembelajaran kasus kematian maternal di kabupaten dan puskesmas, pembinaan bidan desa, peningkatan keterampilan petugas tentang kelas ibu hamil pembentukan forum peduli Kesehatan Ibu dan Anak (sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk di 3 puskesmas mitra dan 2 puskesmas replikasi), bimbingan teknis Kesehatan Ibu dan Anak di puskesmas dan pelacakan kematian maternal.

b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung meningkat, pada tahun 2014 sebesar 72,28 tahun dan pada tahun 2015 sebesar 72,47 tahun. Kenaikan AHH ini merupakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, maupun kualitas lingkungan yang diiringi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat.

Tabel Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015 (Tahun)

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung	72,77	72,82	72,86	72,88	73,28
Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Timur	70,02	70,14	70,34	70,45	70,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

c. Penolong Persalinan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan tentunya lebih baik dibanding tenaga non medis.

Penolong persalinan oleh tenaga medis (dokter dan bidan) di Kabupaten Tulungagung lebih dari 99 persen, sementara yang ditolong oleh tenaga non-medis hanya sekitar kurang dari 1 persen saja. Namun demikian, persentase tersebut cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 persentase kelahiran yang ditangani oleh tenaga medis terdapat sekitar 99.94 persen.

Tabel Angka Persalinan oleh Tenaga Medis Tahun 2013 - 2015

Penolong Kelahiran	2013	2014	2015
Medis :			
Dokter	1.845	2.202	2.394
Bidan	13.018	13.134	12.614
Lainnya			
Non Medis:			
Dukun	4	8	8
Jumlah	14,867	15,344	15,016

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

d. Imunisasi

Sebenarnya jenis imunisasi cukup beragam baik yang diberikan pada anak-anak maupun pada orang dewasa, tetapi yang jadi focus bahasan disini adalah imunisasi untuk anak balita (bawah 5 Tahun). Sejak tahun 1982, untuk mencegah penyakit yang biasa menyerang anak-anak yang diduga akan mengakibatkan kematian pada bayi, pemerintah Indonesia telah mengusahakan pemberian 4 macam imunisasi yaitu BCG (pencegahan TBC), DPT (pencegahan Dipteri, Partusis dan Tetanus), Polio (pencegahan polio) dan Campak (pencegahan campak) kepada balita. Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi dari keempat jenis yang diprogramkan di atas. Dan berdasarkan data Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi sebagai berikut :

Tabel Cakupan Imunisasi pada Balita Tahun 2013 - 2015

Jenis Kelamin	2013	2014	2015
Perempuan	7.628	7.448	7.456
Laki-laki	7.926	7.553	7.955
Jumlah	15.554	15.001	15.411

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

e. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi pada balita adalah dengan anthropometri yang diukur melalui indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) atau berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Kategori yang digunakan adalah: gizi lebih ($z\text{-score} > +2\text{ SD}$); gizi baik ($z\text{-score} -2\text{ SD}$ sampai $+2\text{ SD}$); gizi kurang ($z\text{-score} < -2\text{ SD}$ sampai -3 SD) dan gizi buruk ($z\text{-score} < -3\text{ SD}$).

Sejak tahun 1992 untuk mengukur keadaan gizi anak balita digunakan standar WHO-NCHS untuk index berat badan menurut umur. Namun dari beberapa studi/survei yang melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan (BB/TB), pada umumnya pengukuran BB/TB menunjukkan keadaan gizi kurang yang lebih jelas, dan sensitif/peka dibandingkan prevalensi berdasarkan pengukuran berat badan menurut umur seperti hasil dari pengukuran prevalensi gizi kurang menurut BB/TB (wasting) sesudah tahun 1992 berkisar antara 10-14 %.

Dari Data dinas Kesehatan, kasus Gizi Buruk di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun, dimana tahun 2014 sebesar 79 kasus, sebagian besar diantaranya pada Balita laki-laki. Dan Tahun 2015 sebesar 54 kasus, dimana sebageaian besar diantaranya perempuan.

Tabel Status Gizi Balita Tahun 2014 - 2015 Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Gizi	2014			2015		
	L	P	Total	L	P	Total
Lebih	270	766	1.516	714	551	1.265
Normal	26.333	27.170	53.503	27.363	26.370	53.733
Kurang	1.213	1.493	2.706	1.151	1.301	2.452
Buruk	43	36	79	26	28	54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

f. Survelans Terpadu Penyakit (STP) Menular Berbasis Puskesmas

Penyakit menular yang juga dikenal sebagai penyakit infeksi dalam istilah medis adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar dan trauma benturan) atau kimia (seperti keracunan) yang mana bisa ditularkan atau menular kepada orang lain melalui media tertentu seperti udara (TBC, Infulenza dll), tempat makan dan minum yang kurang bersih pencuciannya (Hepatitis, Typhoid/Types dll), jarum suntik dan transfusi darah (HIV Aids, Hepatitis dll).

Berdasarkan tabel berikut ini dapat diuraikan bahwa dari 25 jenis penyakit pada puskesmas sentinel, terdapat 43.685 kasus, yang terdiri dari laki-laki (47,08%) dan perempuan (52,91%). Lima penyakit terbesar yang ditemukan antara lain influenza (64.16%), diare (23.56%), tifus perut (8,76%), Peneumonia (1.06 %) TB paru (0.77%). Setelah diamati dari urutan penyakit antara laki-laki dan perempuan, terbukti bahwa urutan penyakit teratas berdasarkan jenis kelamin ternyata baik laki-laki maupun perempuan tetap influenza urutan pertama, diare urutan kedua, tifus diurutkan ketiga. Hal ini menandakan bahwa tidak ada pengaruh antara urutan penyakit dengan perbedaan jenis kelamin. Yang berbeda hanya jumlah kasus, yaitu penderita perempuan lebih besar 2,9 % dari jumlah penderita laki-laki. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Survelans Terpadu Penyakit (STP) Menular Berbasis Puskesmas Tahun 2015

No.	Jenis Penyakit Menular	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Kolera	1	-	1
2	Diare	3,551	4,305	7,856
3	Diare Berdarah	41	28	69
4	Tifus perut klinis	1,375	1,546	2,921
5	TBC Paru BTA (+)	114	77	191
6	Tersangka TBC Paru	133	124	257
7	Kusta PB	5	-	5

No.	Jenis Penyakit Menular	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
8	Kusta MB	5	27	32
9	Campak	16	6	22
10	Difteri	-	-	-
11	Batuk Rejan	-	-	-
12	Tetanus	-	-	-
13	Hepatitis Klinis	11	8	19
14	Malaria Klinis	3	-	3
15	Malaria Vivax	-	-	-
16	Malaria Falsifarum	-	-	-
17	Malaria Mix	-	-	-
18	Demam Berdarah Dengue	103	84	187
19	Demam Dengue	16	17	33
20	Pneumonia	198	156	354
21	Sifilis	-	-	-
22	Gonorrhoe	1	-	1
23	Frambusia	-	-	-
24	Filariasis	-	-	-
25	Influenza	10,131	11,268	21,399
	Jumlah	15,704	17,646	33,350

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

4. Ekonomi

a. Produk *Domestic Regional Bruto* (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB).

PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, yaitu dari Rp.25,810 trilyun menjadi Rp.28,748 trilyun, atau sebesar 11,38%. PDRB ADHK juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 yaitu dari Rp.21,242 trilyun menjadi Rp.22,388 trilyun, atau naik sebesar 5,39%.

Tabel PDRB Kabupaten Tulungagung

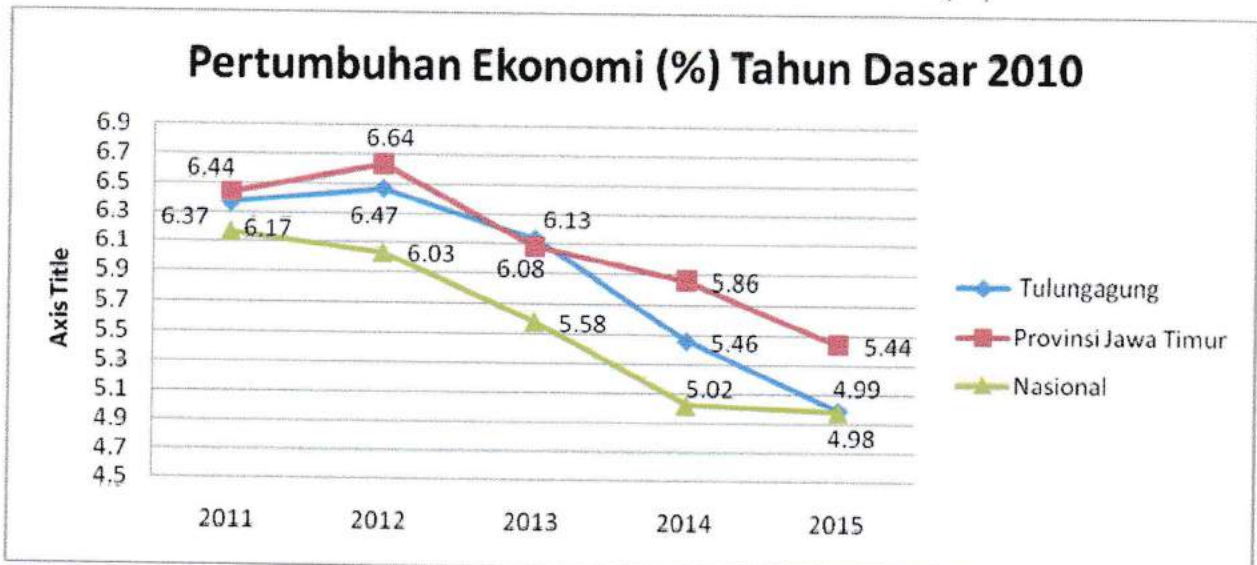
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB ADHB (Rp Juta)	18.859.528,77	21.018.678,80	23.255.261,8	25.780.589,6	28.415.295,10
PDRB ADHK (Rp Juta)	17.845.221,0	18.999.034,9	20.164.271,4	21.265.193,6	22.326.624,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Grafik berikut menyajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama kurun waktu tahun 2011 s/d 2015.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 secara umum mengalami perlambatan dibanding tahun 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya el-nino dengan intensitas yang relatif tinggi, dampak dari perekonomian global, perlambatan konsumsi masyarakat dan peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang mana keseluruhan hal tersebut telah meningkatkan biaya produksi dan operasional.

c. Inflasi

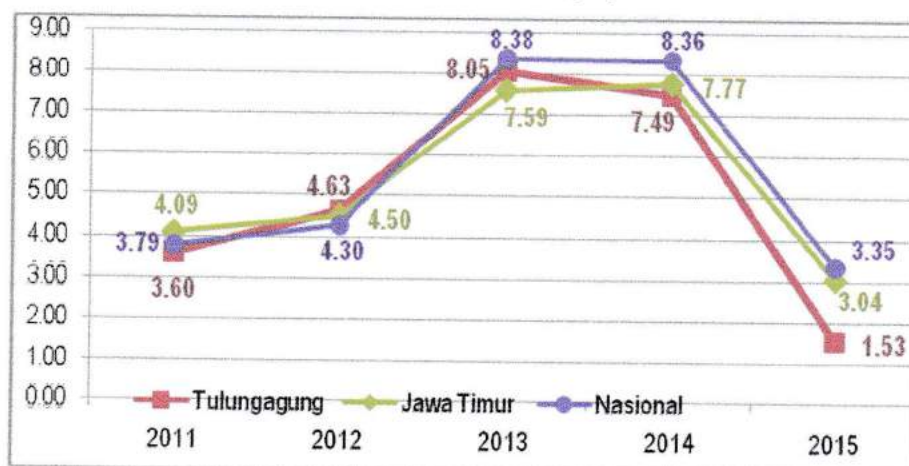
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi yang beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011 - 2015.

Tabel Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011 - 2015 (%)

Laju Inflasi	2011	2012	2013	2014	2015
Tulungagung	3,60	4,63	8,05	7,49	1,53
Jawa Timur	4,09	4,50	7,59	7,77	3,04
Nasional	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Grafik Perbandingan Inflasi Antara Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional (%) Tahun 2011 - 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2014 sebesar 7,49%, dan tahun 2015 turun menjadi 1,53%. Angka ini berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Inflasi di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan mengindikasikan adanya ketersediaan barang dan jasa yang lebih besar dibandingkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tersebut sehingga harga cenderung turun.

d. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah menggambarkan besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Struktur Ekonomi Menurut Sektor (%) Tahun 2015

Lapangan Usaha		2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,81
2	Pertambangan dan Penggalian	4,03
3	Industri Pengolahan	20,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08
6	Konstruksi	9,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,46
8	Transportasi dan Pergudangan	2,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,86
10	Informasi dan Komunikasi	5,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28
12	Real Estat	1,98
13	Jasa Perusahaan	0,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,16
15	Jasa Pendidikan	4,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06
17	Jasa Lainnya	1,28
Jumlah		100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 didominasi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 22,81%. Diurutan yang kedua adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 20,48%, diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 19,46%.

e. Ketenagakerjaan

1) Angkatan Kerja

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja juga mengalami penambahan. Penduduk usia kerja yang dimaksud berumur 15 tahun keatas yang merupakan sumber angkatan kerja potensial.

Pada tahun 2015, Angkatan kerja Kabupaten Tulungagung sebanyak 599.060 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan angkatan kerja pada tahun 2014 yaitu 541.138 jiwa. Jika dilihat dari jenis kelamin, terdapat perbedaan angkatan kerja dimana angkatan kerja perempuan lebih besar dari angkatan kerja laki-laki Adanya perbedaan ini disebabkan antara lain jumlah penduduk perempuan memang lebih besar. Selain itu angkatan kerja laki-laki banyak yang merantau.

Tabel Angkatan Kerja berdasarkan jenis kelamin Tahun 2011-2015

Tahun	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
2015	336.270	262.790	599.060
2014	306.807	234.331	541.138
2013	309.400	236.067	545.467

Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Adapun untuk penduduk bekerja tahun 2015 sebesar 584.568 jiwa, dimana berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 329.312 jiwa dan perempuan 255.256 jiwa

2) Pencari Kerja

Timbulnya pengangguran adalah disebabkan oleh banyaknya pencari kerja yang tidak dapat diimbangi oleh penciptaan kesempatan kerja. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, jumlah pengangguran cenderung meningkat, yang disebabkan oleh dua kondisi yang berlawanan. Disatu sisi jumlah pencari kerja semakin bertambah, baik berupa pendatang baru maupun mereka yang lepas/ keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetapi disisi lain, kesempatan kerja yang tersedia justru menciut karena kontraksi ekonomi atau tumbuh dalam besaran yang sangat terbatas karena minimnya investasi atau investasi yang ada lebih bersifat padat modal.

Jumlah pencari Kerja di Tulungagung yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 4.447 jiwa, dimana proporsi terbesar adalah perempuan yaitu 62 %, dimana dari sisi pendidikan sebagian besar SLTP. Adapun pencari kerja yang ditempatkan sebesar 3.319 jiwa atau sekitar 75 % dari total Pencari Kerja terdaftar di Tulungagung.

Tabel
Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2015

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja terdaftar			Pencari Kerja ditempatkan		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	SD	139	302	441	91	274	365
2	SLTP	483	1.482	1.965	324	1.378	1.702
3	SLTA	898	746	1.644	625	618	1.243
4	PT	159	238	397	1	8	9
	Jumlah	1.679	2.768	4.447	1.041	2.278	3.319

Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

3) Tenaga Kerja Indonesia

Perkembangan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri selama kurun waktu tahun 2011 - 2015 bisa disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2011 - 2015

2011			2012			2013			2014			2015		
Jenis Kelamin		Jml	Jenis Kelamin		Jml	Jenis Kelamin		Jml	Jenis Kelamin		Jml	Jenis Kelamin		Jml
L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
1.337	2.388	3.725	497	2.276	2.773	413	2.502	2.915	967	2.222	3.189	1.020	2.191	3.211

Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Grafik Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011 - 2015



Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan, kenaikan ini mengindikasikan adanya keinginan masyarakat Tulungagung untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tabel Banyaknya Migrasi Internasional (TKI dan TKW) dari Sulawesi Selatan Menurut Tujuan Negara dan Jenis Kelamin, Tahun 2015

Tujuan Negara	Jenis Kelamin		Total	Persentase	
	L	P		L	P
Brunei Darussalam	464	115	579	80.14	19.86
Hongkong	1	546	547	0.18	9.82
Malaysia	142	21	163	87.12	12.88
Singapura	-	82	82	0.00	100
Taiwan	413	1,427	1.840	22.45	77.55
Jumlah	1.020	2.191	3.211	31.77	68.23

Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah TKI asal Kabupaten Tulungagung yang diberangkatkan mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2014 dari 3.189 jiwa menjadi 3.211 jiwa dan negara Taiwan menjadi negara yang paling banyak penempatan TKI asal Kab. Tulungagung dengan jumlah penempatan 1.840 jiwa atau 57% dari jumlah seluruh negara tujuan yang ada. Dan apabila dilihat dari jenis Kelamin , maka proporsi terbesar untuk TKI di Kabupaten Tulungagung adalah Tenaga Kerja Perempuan yaitu 68.23 %.

Tabel Daerah Asal TKI per Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Tulungagung	61
2	Ngantru	176
3	Campurdarat	183
4	Kedungwaru	136
5	Bandung	265
6	Besuki	282
7	Pakel	162
8	Sumbergempol	249
9	Tanggunggunung	91

NO	KECAMATAN	JUMLAH
10	Kalidawir	266
11	Pucanglaban	163
12	Rejotangan	401
13	Ngunut	251
14	Boyolangu	166
15	Karangrejo	77
16	Kauman	56
17	Gondang	125
18	Pagerwojo	31
19	Sendang	66

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa daerah yang paling banyak menyumbang angka pemberangkatan TKI asal Kabupaten Tulungagung yaitu Kecamatan Rejotangan yang berjumlah 401 jiwa atau 12,5% dari jumlah seluruh TKI yang ada.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Isu utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Tulungagung adalah pengangguran, meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun hingga tahun 2015 ini tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 21.599 jiwa atau sebesar 3.94%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah :

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur (%) Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulungagung	3,58	3,18	2,77	2,42	3,95
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur	4,16	4,12	4,33	4,19	4,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

**Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan jenis kelamin (%) Tahun 2014 - 2015**

TPT	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
2014	2.07	2.87	2.42
2015	4.03	3.83	3.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014 sebesar 2,42% dan pada tahun 2015 sebesar 3,95%. Namun demikian angka TPT ini masih berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,47% dan masih berada di bawah standar (standar: 4% s/d 5%). Adapun untuk berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa TPT pada perempuan cenderung lebih tinggi dari tahun ke tahun dibandingkan laki-laki.

Tingkat pengangguran di Jawa Timur dan Tulungagung tinggi disebabkan antara lain: banyak lulusan SMA/SMK/MA/pondok pesantren yang tidak siap kerja; banyak pekerja pertanian yang menganggur saat menunggu musim tanam; semakin banyak perusahaan melakukan PHK; dan semakin meningkatnya jumlah masyarakat dari luar Jawa Timur yang masuk dan bekerja di Jawa Timur.

5. Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu modal sosial yang secara potensi dapat dikatakan sebagai faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu pelayanannya haruslah semaksimal mungkin dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Setiap masalah sosial hakekatnya menjadi sasaran garapan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik masalah yang bersifat konvensional (kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan) maupun korban pembangunan. Masalah sosial konvensional tersebut antara lain anak terlantar, anak nakal, tuna susila, gelandangan, pengemis, korban penyalahgunaan narkoba dan aditif, wanita dan lansia yang diperlakukan salah atau korban kekerasan, penyandang cacat, bekas narapidana, jompo terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga miskin, keluarga yang kondisi dan perumahan lingkungan tidak layak huni, Keluarga bermasalah sosial psikologis, korban bencana alam dan musibah lainnya, masyarakat terasing, balita terlantar, anak jalanan dan masalah sosial lainnya.

Program dan kegiatan untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga dilakukan terhadap : Gelandangan, pengemis dan orang terlantar untuk dikembalikan ke daerah asal, Pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE), Pemberian pelatihan kepada para penyandang cacat tubuhdan cacat netra, Pemberian bantuan sembako kepada korban bencana alam dan bencana sosial selama masa tanggap darurat, entri data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan kepada RTSM

melalui program keluarga harapan (PKH) serta pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai ujung tombak petugas yang menangani PMKS diwilayah Kabupaten Tulungagung.

Berikut disajikan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tulungagung.

Tabel Jumlah Yatim Piatu dan Anak Terlantar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Besuki	22	135	157
2	Bandung	33	28	61
3	Pakel	337	306	643
4	Campurdarat	55	62	117
5	Tanggunggunung	166	141	307
6	Kalidawir	286	324	610
7	Pucanglaban	146	145	291
8	Rejotangan	125	151	276
9	Ngunut	28	34	62
10	Sumbergempol	43	49	92
11	Boyolangu	381	477	858
12	Tulungagung	155	133	288
13	Kedungwaru	79	65	144
14	Ngantru	144	75	219
15	Karangrejo	28	21	49
16	Kauman	36	20	56
17	Gondang	30	25	55
18	Pagerwojo	63	61	124
19	Sendang	174	136	310
Jumlah/Total : 2015		2.331	2.388	4.719

Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Tabel PMKS dan Eks Korban Bencana Alam yang Ditangani dan Mendapat Bantuan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	110
2	Fakir Miskin melalui KUBE	55
3	Korban bencana yang mendapat bantuan	414
4	Lansia terlantar	30
5	Rumah Tidak Layak Huni	89
6	Penyandang cacat	58
7	ODHA	15
8	Pembinaan Tagana	40
Jumlah / Total : 2015		811

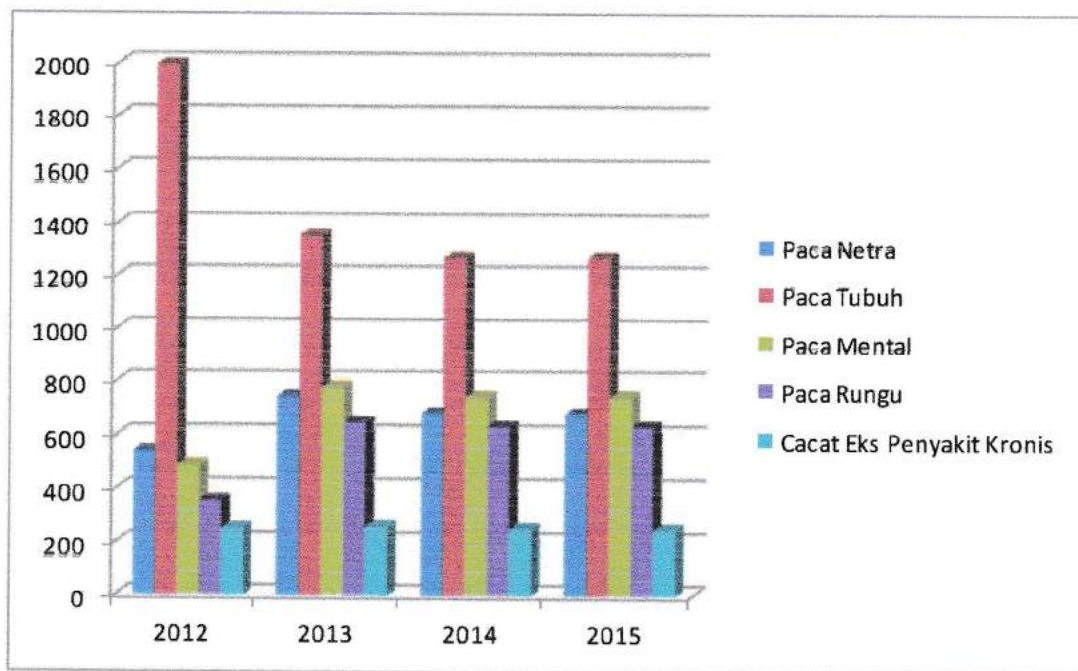
Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

**Tabel Jumlah Penyandang Cacat menurut Jenisnya
di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 - 2015**

Tahun	Paca Netra	Paca Tubuh	Paca mental	Paca Rungu	Cacat Eks Penyakit Kronis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	542	1.996	490	356	253	3.637
2013	743	1.355	777	651	260	3.786
2014	681	1.271	742	636	253	3.583
2015	679	1.272	743	635	250	3.579

Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

**Grafik Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenisnya
Tahun 2012 - 2015**



Sumber : Database Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung dalam tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun 2014, adapun pada beberapa jenis disabilitas mengalami kenaikan akan tetapi secara keseluruhan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan. Penyandang disabilitas jenis tunanetra mengalami penurunan dari tahun 2014 yang berjumlah 681 jiwa pada tahun 2015 berubah menjadi 679 jiwa, penurunan jumlah penyandang tunanetra ini disebabkan karena meninggal dunia. Pada penyandang tunadaksa mengalami kenaikan 1 jiwa dari tahun 2014 yang berjumlah 1.271 jiwa menjadi 1.272 jiwa pada tahun 2015, bertambahnya penyandang tunadaksa ini diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam tabel diatas dapat dilihat juga bertambahnya penyandang tunagrahita yang pada tahun 2014 berjumlah 742 jiwa menjadi 743 jiwa pada tahun 2015, selanjutnya penyandang tunarungu wicara mengalami penurunan jumlah sebanyak 1 jiwa yang disebabkan penyandang tersebut sembuh dari kondisi ketidaksempurnaan yang dialami. Penyandang disabilitas yang disebabkan oleh penyakit kronis mengalami penurunan 3 jiwa yang dari tahun 2014 berjumlah 253 jiwa pada tahun 2015 menjadi 250 jiwa. Penurunan jumlah ini disebabkan karena penyandang disabilitas tersebut meninggal dunia.

Bila dilihat dari kasus kekerasan pada anak atau dapat dikatakan anak dengan perlindungan kasus, data sampai dengan Nopember 2016 adalah sebagai berikut :

KASUS	JUMLAH
Anak Korban Kejahatan Seksual	18
Anak Korban Penculikan, penjualan dan atau perdagangan	-
Anak berhadapan dengan hukum	16
Anak Korban Kekerasan fisik/psikis	36
Anak Korban perlakuan salah /penelantaran	11
Anak Korban Eksploasi Ekonomi	-
Anak dengan Penyakit Kronis/menular	7
Anak dengan permasalahan akses layanan dasar	14
	102 Kasus

Sumber : *ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 2016*

6. Sektor Publik

Peran aktif perempuan dalam pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan diri yang dapat dilihat pada bidang-bidang yang memberi pengaruh luas disektor publik meliputi politik dan sektor pemerintahan. Partisipasi perempuan memberikan kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual menuju terwujudnya kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki yang selaras, serasi, dan seimbang yang dilandasi saling menghormati, saling menghargai, saling membutuhkan dan saling mengisi. Dengan demikian akan terdapat persamaan status, kedudukan, hak kewajiban dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing.

1) Partisipasi Perempuan dalam Legislatif

Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu wajib menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik. Hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak boleh ditolerir, karena dapat menghambat pertumbuhan

kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan mempersulit perkembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum memberikan dukungan untuk terlaksananya *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan di bidang partai politik.

Ditentukannya 30% pengurus partai politik di semua tingkatan harus diisi oleh perempuan dan 30% calon anggota legislatif juga diisi oleh perempuan dengan jaminan penempatan pada nomor urut kopiah atau dasi, cukup memberi peluang kepada peningkatan peranan perempuan secara kuantitatif. Tetapi hal tersebut belum menjamin calon anggota legislatif dari kalangan perempuan akan benar terpilih, karena partai politik berubah pikiran dalam penetapan calon terpilih dari berdasar nomor urut ke berdasar suara terbanyak. Artinya bila hal tersebut menjadi keputusan politik calon anggota legislatif dari kalangan kaum hawa harus lebih keras dalam mengumpulkan pemilih. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut diperlukan sebagai sarana perubahan *sosio cultural* menuju persamaan gender dalam kehidupan politik. Hukum sebagai sarana perubahan sosial diharapkan mampu mengubah pola peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang masih diwarnai oleh ciri-ciri suatu masyarakat tradisional paternalistik.

No	Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	1	12
2	Partai Hati Nurani Rakyat	4	2	6
3	Partai Amanat Nasional	5	-	5
4	Partai Kebangkitan Bangsa	5	1	6
5	Partai Golongan Karya	4	1	5
6	Partai Demokrat	4	-	4
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	-	7
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	-	2
9	PBB	1	-	1
10	PPP	1	-	1
11	Partai Nasdem	1	-	1
	Jumlah	45	5	50

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung

Dari data Tabel terlihat bahwa dari seluruh Anggota DPRD, proporsi perempuan hanya sebesar 10 % artinya belum memenuhi kuota 30 %.

2) Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang eksekutif

Partisipasi perempuan dalam eksekutif dapat dilihat dari jumlah mereka yang terlibat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah semua pegawai yang bekerja pada dinas, badan dan lembaga lainnya yang berada di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten Tulungagung . Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015 disajikan pada Tabel berikut .

Dimana Jumlah PNS Perempuan lebih besar dari jumlah PNS laki-laki. Jumlah PNS perempuan sebanyak 7.114 jiwa, adapun PNS laki-laki 6.471, hal ini menunjukkan semakin kuatnya posisi perempuan dalam jabatan publik.

Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2015

Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1.1 Golongan I	467	19	486	
1.2 Golongan II	1.714	1.585	3.299	
1.3 Golongan III	1.964	2.577	4.541	
1.4 Golongan IV	2.326	2.933	5.259	
Jumlah /Total :				
	2015	6.471	7.114	13.585
	2014	6.570	7.249	13.819
	2013	6.745	7.433	14.178
	2012	7.042	7.681	14.723
	2011	7.234	7.780	15.014

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

BAB III

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Isu Strategis

Berbagai Isu strategis yang dihadapi terkait Pengarusutamaan Gender, antara lain :

1. belum optimalnya pelebagaan pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran;
2. masih tingginya kasus kekerasan perempuan;
3. rendahnya akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, serta sosial budaya;
4. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan Perempuan;
5. masih minimnya produk hukum yang berperspektif gender; dan
6. belum optimalnya penggunaan data / kajian gender dalam pembangunan

2. Strategi

Terhadap isu-isu dimaksud sekaligus mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, maka strategi yang rencana diterapkan :

1. meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender;
2. peningkatan sarana dan prasarana responsif gender;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan penganggaran responsif gender;
4. pencegahan/penanganan kekerasan pada perempuan, *trafficking*;
5. meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan diberbagai sektor pembangunan;
6. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
7. harmonisasi hukum; dan
8. penguatan data gender dan data terpilah.

3. Arah Kebijakan

1. Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Pokja Pengarusutamaan Gender
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
3. Peningkatan Sarana Prasarana Responsif Gender
4. Penguatan Anggaran yang Responsif Gender
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait PPRG
6. Pengendalian/Pengawasan PPRG
7. Penurunan /Pencegahan KDRT, Trafficking
8. Penanganan Buruh Migran Perempuan yang Bermasalah
9. Pengurangan Diskriminasi bagi Penyandang Cacat
10. Pengurangan Diskriminasi dari Lansia
11. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pendidikan

12. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Kesehatan
13. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial
14. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Politik/Jabatan Publik
15. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Lingkungan Hidup
16. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi Perempuan
17. Sosialisasi/Advokasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
18. Peningkatan Produk Hukum yang Berperspektif Gender
19. Penyusunan Sistem Data dan Informasi Gender
20. Peningkatan Kajian terkait Gender

4. Matrik RAD PUG 2017-2018

Penjabaran isu, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, target dan penanggung jawab RAD PUG 2017-2018 dapat dilihat dalam matrik berikut ini pada halaman 32 sampai dengan halaman 41 Lampiran Peraturan Bupati ini.

MATRIK RAD PUG 2017-2018

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pembangunan Berperspektif Gender	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	1 Peningkatan koordinasi kelembagaan Pokja PUG	Perencanaan Sosial/Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Koordinasi terkait Gender	4 kali koordinasi	4 kali koordinasi	5 kali koordinasi	Bappeda
			Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera	Pembinaan terhadap kader pembangunan khususnya kader perempuan pada desa binaan	belum dibina	Desa Pojok Kecamatan Ngantru	Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
		2 Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender	Perencanaan Sosial/Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Kegiatan Penguatan kapasitas bagi Focal point gender	1 kali koordinasi	2 kali koordinasi	2 kali koordinasi	Bappeda
			Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Sosialisasi kepada anggota Pokja PUG	Meningkatnya pemahaman anggota Pokja PUG akan arti pentingnya pembangunan berspektif Gender	pemahaman terhadap isu Gender masih belum sepenuhnya dipahami oleh anggota Pokja PUG	3 kali	4 kali	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Responsif Gender	Peningkatan Sarana Prasana Responsif Gender	Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan Jalan di Kabupaten Tulungagung	Terbangunnya jalan dalam kondisi baik	135 km	100 km	80 km	DPU dan Penataan Ruang
				2. Pembangunan Jembatan di Kabupaten Tulungagung	Terbangunnya jembatan dalam kondisi baik	13 unit	12 unit	15 unit	
			1 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	Optimalisasi Sarana Air Minum di Kabupaten Tulungagung	Prosentase cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	67%	90%	95%	DPU Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air
			2 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sarana Air Minum di Kabupaten Tulungagung					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan Halte di Wilayah Kabupaten Tulungagung	Jumlah halte pada tiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	1 unit halte	1 unit halte	Dinas Perhubungan	

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB				
							2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8		9				
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	1 Penguatan Anggaran yang Responsif Gender	Perencanaan Sosial/Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah koordinasi terkait dengan ARG	2 kali	2 kali	3 kali	Bappeda				
			Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pelatihan bagi tenaga SunGram SKPD untuk bisa melakukan PPRG dilembaganya	Mampu menyusun anggaran yang responsif Gender (disetiap SKPD)	Belum semua SKPD menyertakan dokumen PPRG	1 kali	1 kali	Dinas Sosial, KB, PP dan PA				
		2 Peningkatan Kapasitas SDM terkait PPRG	Perencanaan Sosial/Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	jumlah Bimtek PPRG	1 kali	1 kali	1 kali	Bappeda				
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Sosialisasi Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas administrasi keuangan	PA : 49 PI : 71 Rp 100.000.000	PA : 39 PI : 81 Rp 100.000.000	PA : 39 PI : 81 Rp 100.000.000	BPKAD				
		2 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	2 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	2 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Menyusun laporan keuangan SKPD yang berbasis akrual	PA : 39 PI : 81 Rp 200.000.000	PA : 39 PI : 81 Rp 200.000.000	PA : 39 PI : 81 Rp 200.000.000	BPKAD				
										3 Pengendalian / Pengawasan PPRG	Perencanaan Sosial/Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Monitoring evaluasi dan pengawasan ARG
		Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Sosialisasi tentang Anggaran Responsif Gender	Masing-masing SKPD sudah menyusun ARG (ada Dokumen PPRG)	Belum semua SKPD dalam penyusunan anggarannya disertakan pula Dokumen ARG nya	1 SKPD minimal ada 1 dokumen PPRG (GAP, TOR, GBS)	masing - masing SKPD telah menganalisis Gender pada anggarannya lebih dari satu kegiatan	Dinas Sosial, KB, PP dan PA			
											Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	% laporan hasil pemeriksaan SKPD, perusahaan daerah, kecamatan, desa, kelurahan dan sekolah
		2. Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah	% laporan hasil evaluasi LKJIP SKPD dan Review LKJIP	70%	80%	90%							
							3. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	% hasil pemeriksaan permasalahan/kasus pengaduan masyarakat	70%	75%			
Tingginya Kasus Kekerasan Perempuan	Pencegahan/ Penanganan Kekerasan pada Perempuan, Trafficking	1 Penurunan / Pencegahan KDRT, Trafficking	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Pelatihan bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban	Para pendamping dan petugas pelayanan memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam melayani korban	ketrampilan dan kemampuan masih belum sepenuhnya dikuasai					7 kali dengan sasaran yang berbeda-beda	6 kali dengan sasaran yang berbeda-beda	Dinas Sosial, KB, PP dan PA

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				Sosialisasi ttg upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan ke sekolah maupun desa/Kecamatan	masyarakat dan anak-anak mampu membentengi diri serta memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya serta akibat dari adanya kekerasan	masih banyaknya kasus kekerasan dimasyarakat khususnya yang melibatkan anak dan perempuan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku	7 sekolah dan 7 desa	7 sekolah dan 7 desa	
			Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Sistem Jemput Bola	Angka kepemilikan dokumen kependudukan (KK) meningkat	KK = 100 %	KK = 100 %	KK = 100 %	- Dispendukcapil
				Peningkatan Pelayanan KTP-el	Tersedianya sarana pendukung KTP-el	KTP = 95 %	KTP = 95 %	KTP = 95 %	
				Peningkatan Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	Pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil meningkat	Akte Kematian = 17 % Akte Kelahiran = 113 %	Akte Kematian = 45 % Akte Kelahiran = 95 %	Akte Kematian = 70 % Akte Kelahiran = 95 %	
		2 Penanganan Buruh Migran Perempuan yang Bermasalah	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga TKI	Tertaksananya Pembinaan Kelompok Bina Keluarga TKI dalam mengelola Ekonomi, Ketahanan Keluarga dan Tumbuh Kembang Anak	Ada 4 Kelompok	Ada 5 Kelompok	Ada 6 Kelompok	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
			Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian TKI Bermasalah di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya penanganan TKI Bermasalah di Kabupaten Tulungagung	103 orang	154 orang	205 orang	Disnakertrans
		3 Pengurangan Diskriminasi bagi Penyandang Cacat	Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung	Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya ketrampilan bagi penyandang cacat	50 orang	110 orang	115 orang	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
		4 Pengurangan Diskriminasi dari Lansia	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan ASLUT di Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya kesejahteraan bagi lanjut usia terlantar	160 orang	200 orang	240 orang	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
Kualitas / Kapasitas Perempuan pada Pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perempuan diberbagai sektor pembangunan	1 Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pendidikan	1 Buta Huruf	Keaksaraan Fungsional	Angka Melek Huruf	0.39%	0.36%	0.34%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan
			2 Kesetaraan	Paket B dan Paket C	Jumlah lembaga pendidikan khusus	0.60%	0.70%	0.80%	
			3 Kursus	Kecakapan Hidup (Life Skill)	Jumlah lembaga pendidikan khusus	0.53%	0.56%	0.60%	
			Peningkatan pelayanan angkutan	Operasional angkutan sekolah gratis	Meningkatkan keselamatan anak usia sekolah	95%	95%	95%	Dinas Perhubungan

ISUI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	Bertambahnya koleksi bahan pustaka Bertambahnya sarana dan prasarana kelengkapan	750 eksemplar	750 eksemplar	750 eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Peningkatan dan penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan (Digital Library)	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi secara digital Terlaksananya dedicated server perpustakaan melalui jasa hosting	60.000 pengunjung	60.000 pengunjung	60.000 pengunjung	
				Pengelolaan Layanan Baca	Bertambahnya sarana dan prasarana pelayanan baca di perpustakaan umum daerah Bertambahnya 1 unit motor keliling	100 kali	100 kali	100 kali	
				Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan perpustakaan	Jumlah lomba minat baca Jumlah gelar pelayanan publik Jumlah Bimtek perpustakaan sekolah tingkat SLTP Jumlah penyusunan IKM layanan perpustakaan	Nilai IKM B	Nilai IKM B	Nilai IKM B	
		2 Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Kesehatan	1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	41.55%	79%	80%	Dinas Kesehatan
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	45.45%	70%	75%	
					Cakupan kunjungan ibu hamil K-1	47.16%	99%	99%	
					Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	46.13%	91.5%	92%	
					Deteksi resiko tinggi ibu hamil oleh tenaga kesehatan	10.40%	19.5%	20%	
					Kunjungan neonatus KN 1 murni	50.27%	96%	98%	

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
					Kunjungan neonatus KN lengkap	48.39%	97%	97%	
					Cakupan pelayanan nifas	46.24%	96%	97%	
					Jumlah Puskesmas PKRT	4 puskesmas	4 puskesmas	5 puskesmas	
			2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Persentase Posyandu Lansia PURI	82.70%	91.50%	92.00%	
					Jumlah Puskesmas santun lansia dengan strata 2 dan 3	2 puskesmas	4 puskesmas	4 puskesmas	
			3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah	Cakupan pelayanan anak balita	59.30%	75%	80%	
					Cakupan pelayanan anak prasekolah	64.10%	77%	80%	
			Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS	Jml. Alat kesehatan utk. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak RSUD	75% 4 unit alat kesehatan	77.50% 5 unit alat kesehatan	80% 5 unit alat kesehatan	RSUD dr Iskak
		3 Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemberdayaan Wanita Rwan Sosial Ekonomi (WRSE)	Meningkatnya kondisi sosial ekonomi WRSE melalui pengelolaan UEP	20 orang	28 orang	34 orang	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
		4 Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Politik/ Jabatan Publik	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Mutasi dan Promosi PNS	Prosentase Pejabat struktural perempuan	30%	20%	30%	BKD
		5 Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pelaksanaan Program Kampung Bersih 2. Pelaksanaan Program Eco Office	Jumlah RW yang mengikuti lomba kampung bersih Jumlah SKPD yang mengikuti lomba perkantoran yang ramah lingkungan	90 RW 40 SKPD/Kantor	90 RW 40 SKPD/Kantor	95 RW 40 SKPD/Kantor	Dinas Lingkungan Hidup
		6 Pengurangan Kesenjangan Ekonomi Perempuan	1 Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	1. Pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten 2. Pengembangan lumbung pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara tepat dan cepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan terencegahnya kerawanan pangan. Meningkatnya kemampuan kelompok dalam mengelola cadangan pangan masyarakat guna melayani kebutuhan pangan anggotanya	18,5 ton 9 kelompok lumbung pangan	48,5 ton 12 kelompok lumbung pangan	48,5 ton 12 kelompok lumbung pangan	Dinas Ketahanan Pangan

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				3. Pemantapan ketahanan pangan melalui koordinasi dan sinkronisasi dewan ketahanan pangan	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan eksistensi penanganan ketahanan pangan masyarakat	10 SKPD	16 SKPD	16 SKPD	
				4. Penyusunan neraca bahan makan (NBM)	Tersusunnya data informasi ketersediaan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan masyarakat	Kabupaten Tulungagung 80 %	Kabupaten Tulungagung 100%	Kabupaten Tulungagung 100%	
				5. Pengembangan ketersediaan pangan berbasis non beras (umbi-umbian)	Meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan tanaman umbi-umbian	Tim Penggerak PKK di 4 Desa kabupaten Tulungagung	Tim Penggerak PKK di 12 Desa kabupaten Tulungagung	Tim Penggerak PKK di 12 Desa kabupaten Tulungagung	
				6. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Meningkatnya peran petani dalam penyediaan cadangan pangan di setiap saat untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya di saat paceklik	2 Gapoktan penerima program P-LDPM	9 Gapoktan penerima program P-LDPM	9 Gapoktan penerima program P-LDPM	
				7. Pengumpulan panel harga pangan	Tersedianya data tentang perkembangan harga pangan	Pasar besar di 19 kec.	Pasar besar di 19 kec.	Pasar besar di 19 kec.	
				8. Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia	Harga produk pangan yang di jual/belikan oleh pedagang TTI stabil	5 Gapoktan	6 toko tani di 6 kec	6 toko tani di 6 kec	
				9. Pemutakhiran peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA)	Berkurangnya wilayah/penduduk rawan pangan	Kabupaten Tulungagung (80 %)	19 kecamatan	19 kecamatan	
				10. Analisa ketahanan pangan dan penyuluhan	Meningkatnya kinerja dan sinergi program kegiatan ketahanan pangan		2 laporan analisa profil	2 laporan analisa profil	
				11. Peningkatan sarana dan ketahanan pangan dan penyuluhan (DAK bidang pertanian)	Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan penyuluhan	2 BPP	9 BPP	9 BPP	
				12. Peningkatan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Tersedianya data dan laporan hasil analisa SKPG secara periodik	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	
				13. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya pengetahuan mutu dan pemahaman keamanan pangan bagi pedagang dan guru	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung	

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				14. Pengembangan diversifikasi pangan dalam rangka penganeekaragaman pangan dan gizi	Terlaksananya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan penyediaan pangan dengan mengembangkan usaha diversifikasi pangan dilahan pekarangan analisa PPH dan laporan hasil	Kabupaten tulungagung	Kabupaten tulungagung	Kabupaten tulungagung	
			2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Pemberdayaan penyuluhan bagi tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP)	Meningkatnya kegiatan penyuluhan oleh THL-TBPP		4 X temu lapang oleh 86 THL	4 X temu lapang oleh 86 THL	
				2. Evaluasi kinerja penyuluh	Meningkatnya kinerja penyuluhan	1 x evaluasi dalam setahun	2 x evaluasi dalam setahun	2 x evaluasi dalam setahun	
				3. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kab. Tulungagung 80 %	171 orang (3 orang x 19 BPP)	171 orang (3 orang x 19 BPP)	
			3 Program peningkatan kesejahteraan petani	1. Pemantapan lembaga balai penyuluh pertanian (BPP) sebagai Posko swasembada berkelanjutan	Berfungsinya BPP sebagai pos simpul Koordinasi dalam mendukung program swasembada pangan	Terlaksananya temu teknis petugas lapang dengan petani dan pihak terkait (80 %)	4 x pertemuan koordinasi di 19 BPP	4 x pertemuan koordinasi di 19 BPP	
				2. Peningkatan jenjang lembaga kelompok tan/gapoktan dan penyuluh pertanian	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan penyuluh PNS, swadaya dan swasta (80%)	3 x penilaian di 19 BPP	3 x penilaian di 19 BPP	
				3. Kegiatan penguatan kelembagaan petani dan penyuluh	Meningkatnya koordinasi kelembagaan petani	Terlaksananya pembinaan teknis kelembagaan dan terlaksananya fasilitasi badan hukum Gapoktan (80 %)	1 x pembinaan teknis dan bantuan sarana gapoktan	1 x pembinaan teknis dan bantuan sarana gapoktan	
				4. Kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi petani	meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi petani	Terlaksananya pembinaan teknis kelembagaan dan terlaksananya fasilitasi badan hukum Gapoktan 1 paket	19 pembinaan teknis	19 pembinaan teknis	
			4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Gelar pameran agribisnis	Terjalinnnya kemitraan dan kontak bisnis antara petani dan pelaku usaha		1 paket pameran	1 paket pameran	
			5 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. DEM varietas unggul bawang merah	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan petani melalui dem varietas bawang merah	2 paket	140 orang (2 unit)	140 orang (2 unit)	

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				2. Kaji teras varietas Impari 30 dengan sistem tanaman jajar legowo	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan petani melalui kaji teras varietas Impari 30 dengan sistem tanaman jajar legowo		260 orang (4 unit)	260 orang (4 unit)	
				3. Demplot budidaya tanaman pangan/perkebunan	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan petani melalui demplot penggunaan pupuk organik dengan sistem jajar legowo	2 paket	1.105 orang (17 unit)	1.105 orang (17 unit)	
			1 Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Penunjang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan (L/P) dalam memanfaatkan dan mengelola bantuan modal usaha	95%	100%	100%	Dinas Pertanian
				2. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Tanaman Bunga Krisan	Meningkatnya kemampuan petani bunga krisan baik laki-laki maupun perempuan	40 orang petani (laki-laki : 37 orang; perempuan : 3 orang)	40 orang petani (laki-laki : 30 orang; perempuan : 10 orang)	40 orang petani (laki-laki : 25 orang; perempuan : 15 orang)	
				3. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Tanaman Cabe	Meningkatnya kemampuan petani cabai baik laki-laki maupun perempuan	0	40 orang petani (laki-laki : 35 orang; perempuan : 5 orang)	40 orang petani (laki-laki : 30 orang; perempuan : 10 orang)	
				4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Tanaman Bawang Merah	Meningkatnya kemampuan petani bawang merah baik laki-laki maupun perempuan	0	40 orang petani (laki-laki : 35 orang; perempuan : 5 orang)	40 orang petani (laki-laki : 30 orang; perempuan : 10 orang)	
			2 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1. Pemberdayaan Kelompok Usaha Jamur Tiram	Meningkatnya jumlah petani jamur tiram yang mendapatkan pelatihan baik laki-laki maupun perempuan	40 orang petani (laki-laki : 30 orang; perempuan : 10 orang)	80 orang petani (laki-laki : 55 orang; perempuan : 25 orang)	120 orang petani (laki-laki : 80 orang; perempuan : 40 orang)	
				2. Pemberdayaan Kelompok Usaha Komoditi Jahe Merah	Meningkatnya jumlah petani jahe merah yang mendapatkan pelatihan baik laki-laki maupun perempuan	40 orang petani (laki-laki : 40 orang; perempuan : 0 orang)	80 orang petani (laki-laki : 75 orang; perempuan : 5 orang)	120 orang petani (laki-laki : 100 orang; perempuan : 20 orang)	

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			1 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Fasilitasi Peningkatan SDM Pengurus Koperasi syariah	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan 50 Pengurus Koperasi Wanita Syariah	40 Pengurus Koperasi Wanita Syariah	40 Pengurus Koperasi Wanita Syariah	30 Pengurus Koperasi Wanita Syariah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja Koperasi Wanita	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan 100 Pengurus Koperasi Wanita	100 Pengurus Koperasi Wanita	90 Pengurus Koperasi Wanita		
			1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan industri kecil dan menengah di Desa Binaan PKK/P2WKSS	Terlaksananya pemberdayaan wanita pengusaha di Desa Binaan PKK/P2WKSS	25 wanita pengusaha binaan PKK/P2WKSS	35 wanita pengusaha binaan PKK/P2WKSS	50 wanita pengusaha binaan PKK/P2WKSS	Disperindag
Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG	Sosialisasi/advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan gender	Perencanaan Sosial Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Sosialisasi Pedoman PUG	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
			Revisi Perda Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung	Sosialisasi Perda Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung	Tersusunnya Perda Perlindungan Anak (Revisi) menyesuaikan dengan adanya perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35/2014 dan UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Masih Perda lama (Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak)	Terbitnya Perda Sistem Perlindungan Anak	0	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
Minimnya Produk Hukum yang Berperspektif Gender	Harmonisasi hukum	Peningkatan produk hukum yang berperspektif gender	Perencanaan Sosial Budaya	1 Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Review PPRG	0	1 kali	0	Bappeda
			1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bimtek penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten Tulungagung berperspektif gender yang dapat ditetapkan	0			Bagian Hukum
			2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan	8 kali			
Penggunaan Data / Kajian Gender dalam Pembangunan	Penguatan Data Gender dan Data Terpisah	1 Penyusunan sistem data dan informasi gender	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan Profil Gender Kabupaten Tulungagung	Tersusunnya Buku Profil Gender	Profil Gender yang ada disusun Tahun 2015	Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung	0	Dinas Sosial, KB, PP dan PA
		2 Peningkatan kajian terkait gender	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan kepada Organisasi Perempuan, PKK, Keluarga TKI	Tertelaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan kepada Organisasi Perempuan, PKK, Keluarga TKI	Pada skala terbatas	1 kali	1 kali	Dinas Sosial, KB, PP dan PA

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2016	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
							2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			1 Dialog Interaktif di Radio tentang Gender dan Anak	Dialog Integratif di radio perkasa tentang gender dan anak setiap hari Rabu jam 11.00-12.00	Terdapat jadwal secara terstruktur setiap minggu selama 1 tahun	Terlaksana 90 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	PSGA IAIN
			2 Penyuluhan Keagamaan dan Pemberdayaan Perempuan Lapas Wanita Tulungagung	Kejian keagamaan dan pemberdayaan perempuan di Lapas wanita	Terdapat jadwal secara terstruktur setiap minggu selama 1 tahun	Terlaksana 80 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	
			3 Workshop Pendidikan Anak Usia Dini Berperspektif Gender	Pelatihan pendidikan anak usia dini berperspektif gender	Terlaksananya kegiatan workshop pendidikan anak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
			4 Penelitian dan Pengabdian Responsif Gender	Melakukan beberapa penelitian terkait gender dan perlindungan anak	Teridentifikasi judul penelitian dosen yang responsif gender dan perlindungan anak	Terdapat 5 judul penelitian responsif gender dan perlindungan anak	Menambah jumlah penelitian responsif gender dan perlindungan anak minimal 7 judul penelitian	Menambah jumlah penelitian responsif gender dan perlindungan anak minimal 10 judul penelitian	
			5 Diklat Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Pelatihan PKDRT	Terlaksananya kegiatan Training of Trainer PKDRT	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan RAD PUG 2017-2018 merupakan kegiatan pengumpulan informasi pada Perangkat Daerah yang dilakukan secara berkala, dan mengidentifikasi permasalahan. Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan Program/Aksi Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah

2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan RAD PUG 2017-2018 adalah kegiatan untuk memastikan apakah capaian Aksi PUG di Perangkat Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul. Kegiatan evaluasi RAD PUG 2017-2018 dilakukan oleh Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender secara berkala. Kegiatan ini dilakukan di semester pertama dan akhir tahun berjalan. Tahapan yang dilakukan berupa melakukan kajian mengenai aksi PUG dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

BAB V
PENUTUP

Demikian RAD PUG 2017-2018 yang nantinya menjadikan acuan/pedoman Pemerintah Daerah guna mewujudkan pembangunan daerah berperspektif gender.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO